

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan ekonomi Indonesia terealisasi pada pemerintahan Soeharto. Langkah awal yang diambil pada orde ini yaitu meneruskan proses pembangunan REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. REPELITA memiliki tiga tujuan pembangunan yaitu Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan pada masa ini fokus pada pembangunan pertanian dan pedesaan. Ketimpangan dan kesenjangan muncul sejalan dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan karena pembangunan tidak terjadi serempak dan merata pada semua daerah khususnya yang terjadi di antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Kesenjangan ekonomi yang terjadi umumnya karena perbedaan potensi sumberdaya alam setiap daerah. Daerah yang mempunyai potensi SDA tinggi dapat memproduksi dalam jumlah yang besar dan harga yang relatif lebih murah. Hal ini terjadi sebab semakin banyak produksi maka harga dipasaran cenderung menurun.

Umumnya, sektor industri pengolahan memiliki *value added* yang lebih besar daripada sektor pertanian. Semakin tinggi *value added* mendorong arus modal lebih dominan masuk ke daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dan terkonsentrasi pada daerah yang kaya sumberdaya alam. Hal ini mendorong pencari kerja bergerak menuju pusat pembangunan yang lebih menjanjikan yaitu di kota. Tingkat urbanisasi ini sangat wajar terjadi melihat bahwa konsentrasi industri

pengolahan Indonesia masih tinggi dan padat modal berlokasi di pusat kota. Sumberdaya modal kapitalis akan menemui rintangan-rintangan perdagangan yang liberal dimasa depan. Pasokan bahan baku yang diimpor dari luar sangat rentan untuk mengalami kemandegan dan kemacetan. Perkembangan industri pengolahan yang kapitalis mengesampingkan faktor produksi lokal. Padahal industri demikian akan berada pada posisi aman di era perdagangan yang liberal jika menggunakan sumberdaya lokal yang cenderung lebih stabil.

Pada era perdagangan yang liberal, industri pengolahan memprioritaskan pada pengembangan industri yang berbasis sumberdaya lokal dengan beberapa pertimbangan diantaranya sumberdaya lokal memiliki keunggulan komparatif dan berkontribusi terhadap ekspor. Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi bisnis yang mampu bertahan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal setempat. Menurut pendapat Radhi (2008) langkah strategi dalam pembangunan ekonomi bangsa dapat dilakukan dengan merintis ekonomi kerakyatan, industri pedesaan melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Usaha yang berbasis sumberdaya lokal berperan dalam menyediakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pengembangan daerah pedesaan dan yang lebih penting yaitu dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Indonesia mulai merintis pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lokal yang menggunakan pendekatan dengan sistem kawasan. Pembangunan dengan pendekatan kawasan mendorong terlaksana kegiatan agroindustri, yaitu adanya sinergi berbagai elemen dalam sektor pertanian untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan ini diinovasi

menjadi pendekatan *One Village One Product* (OVOP). Indonesia mulai mengagas OVOP sejak tahun 2006 oleh Kementerian Perindustrian. OVOP juga diresmikan sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan terbitnya Inpres No. 6/2007 tentang percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, Peraturan Menperin No. 78/M-Ind/Per/9/2007 tentang peningkatan efektifitas pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP yang mendorong produk lokal industri kecil dan menengah supaya dapat bersaing di pasar global (Kementerian Perindustrian, 2011). OVOP merupakan pendekatan pengembangan daerah yang terintegrasi dengan gerakan bersama menghasilkan produk berkelas global khas daerah produsen dengan menonjolkan kearifan lokal dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia (Pasaribu, 2011).

Pedesaan menjadi fokus potensial untuk mengembangkan wilayah dengan berbasis sumberdaya lokal. Berbagai sektor pendukung serta sumberdaya alam yang tersedia merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Apabila seluruh sektor pendukung dapat dimaksimalkan untuk mengembangkan potensi wilayah, maka hal ini dapat menekan tingkat urbanisasi tenaga kerja. Program ini dapat menjawab tantangan dalam pembangunan sektor pertanian di wilayah pedesaan dengan komitmen dan kerjasama antar pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Agropolitan dipandang sebagai jawaban dari tantangan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan tersebut. Program ini telah diajukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014. Program ini memiliki visi untuk terwujudnya pertanian industrial yang unggul dan berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal. Program agropolitan telah di

uji cobakan pada tahun 2002 di Kabupaten Agam (Sumatra Barat), Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu), Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Kulon Progo (DIY), Kabupaten Bangli (Bali), dan Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur). Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah masyarakat yang berdaya, pengembangan komoditas unggulan pertanian, pengembangan kelembagaan petani dan penyedia jasa pertanian, menarik masuknya investor, serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang. Agropolitan menjadi kawasan pertanian yang mandiri dalam memaksimalkan dan mengembangkan sumberdaya lokal di suatu wilayah khusus.

Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah kurang lebih 95.020,67 ha terdiri dari 23.896,71 ha lahan pertanian sawah (25%), 35.975,78 ha lahan pertanian bukan sawah (38%) dan 35.148,18 ha lahan bukan pertanian (37%) (Badan Pusat Statistik, 2018). Kabupaten Semarang dipilih sebagai kawasan pengembangan kota Agropolitan di Jawa Tengah. Aneka sarana penunjang untuk menggerakkan sistem agropolitan diantaranya adanya terminal agribisnis di Desa Jetis, perluasan pasar sayuran di Jimbaran, laboratorium sayur maupun buah-buahan, dan modernisasi alat-alat pertanian. Beberapa pertimbangan lain diantaranya kondisi geografi yang mendukung pengembangan pertanian hortikultura dan merupakan sentra produksi bunga krisan.

Salah satu sumberdaya lokal hayati yang dimiliki Kabupaten Semarang adalah bunga krisan. Bunga krisan (*Crysanthemum sp*) dipilih sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Semarang, dimana Kecamatan Bandungan menjadi sentra budidaya bunga krisan yang paling potensial di Kabupaten Semarang (Badan Pusat

Statistik, 2015). Bunga krisan tergolong jenis tanaman hias yang prospektif dikembangkan di Indonesia. Secara ekonomi, bunga krisan dapat dijadikan sebagai bunga potong maupun tanaman hias dalam pot. Produksi bunga krisan terbanyak ada di Kecamatan Sumowono, Ambarawa, dan Bandungan. Adapun produksi bunga krisan pada tahun 2016 di Kecamatan Sumowono yaitu 14.659.500 tangkai, Kecamatan Ambarawa 490.250 tangkai dan Kecamatan Bandungan sebanyak 94.368.000 tangkai (Badan Pusat Statistik, 2017).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa komoditas hortikultura memiliki cakupan yang cukup luas, maka perlu adanya integrasi antar berbagai pihak baik pemerintah, petani, masyarakat dan pelaku usaha. Pengembangan agribisnis bunga krisan dilakukan oleh petani di Kecamatan Bandungan menjadi bagian dari pengembangan kawasan agropolitan (Mazdalifa *et al.*, 2013). Mengingat urgensi penerapan kawasan agropolitan yang harus didukung oleh partisipasi masyarakat setempat maka perlu adanya penelitian untuk menganalisis sejauh mana tingkat respon petani terhadap program agropolitan, menganalisis kaitan pengetahuan-sikap-keterampilan petani dengan respon yang diberikan serta menganalisis dampak sosial ekonomi petani. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan diidentifikasi pola pengembangan yang ideal menurut perspektif petani bunga krisan atas pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di daerah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berlakunya Perpu No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah menjadi dasar formal dalam pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan konsep ini mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Menurut salah satu petani krisan, pelaksanaan kawasan agropolitan di Dusun Clapar Kecamatan Bandungan telah mengalami penurunan perhatian. Penyuluh lapang tidak lagi mendampingi petani di lapangan. Program agropolitan seharusnya mendapat partisipasi aktif dari masyarakat di kawasan sekitar meliputi petani, pengusaha dan masyarakat umum dimana pemerintah sebagai fasilitator dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya potensi sumberdaya lokal di pedesaan sangat potensial untuk mendorong keberhasilan program pembangunan nasional melalui pengembangan kawasan agropolitan.

Meskipun memiliki potensi besar, Kecamatan Bandungan memiliki pemasaran dan saluran promosi yang kurang luas, selain itu rendahnya pengetahuan petani tentang program agropolitan menjadi tantangan yang harus dihadapi di lapangan. Hal ini berdampak pada kurang adanya kerjasama yang sinergi antara *stakeholders* (pemerintah, masyarakat maupun swasta) sehingga partisipasi masyarakat menjadi pasif. Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat disusun pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana respon petani terhadap pengembangan program Agropolitan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana kaitan variabel respon petani terhadap pengembangan program Agropolitan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana dampak sosial ekonomi masyarakat petani bunga krisan dengan adanya pengembangan program Agropolitan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian mengenai Respon Petani Bunga Krisan terhadap Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yaitu :

1. Menganalisis respon petani terhadap pengembangan program Agropolitan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang
2. Menganalisis kaitan variabel respon petani terhadap pengembangan program Agropolitan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang
3. Menganalisis dampak sosial ekonomi masyarakat petani bunga krisan di kawasan pengembangan program Agropolitan di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi peneliti sebagai penerapan teori-teori dan pengembangan keilmuan tentang respon petani bunga krisan terhadap pengembangan kawasan agropolitan.

2. Bagi petani bunga krisan sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Bandung dan menambah pengetahuan bagi petani tentang penerapan kawasan agropolitan
3. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memilih cara terbaik yang dapat disepakati oleh semua pihak dalam rangka mengembangkan dan lebih memantapkan kawasan agropolitan
4. Bagi pembaca sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang